



Pendidikan Politik Bagi Pemuda Palangka Raya untuk Mendorong Integritas dalam Pilkada 2024

M. Doddy Syahirul Alam¹, Dian Iskandar², Bismar Harris Satriawan³, Ummu Habibah Gaffar^{4*}

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Indonesia

^{4*}Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Indonesia

Email: ¹doddyalam@fisip.upr.ac.id ²dianiskandar@fisip.upr.ac.id, ³satriawanhb@fisip.upr.ac.id

^{4*}ummuhabibahgaffar@fisip.upr.ac.id

Abstract

The issue of money politics poses a serious threat to the integrity of democracy at both national and local levels. It opens the door for political figures without integrity, while voter preferences are driven more by pragmatism than rationality. This issue demands special attention to ensure that the electoral democratic process is not controlled by capital. Therefore, political education is needed for voters, especially the youth of Palangka Raya, to promote integrity in the 2024 local elections through community service activities. This initiative targets young voters in Palangka Raya, particularly those registered for the 2024 Regional Head Election. The activity is carried out through an educational approach related to voter integrity values and resistance to money politics, culminating in a survey of voters' understanding of the materials presented. This activity was conducted in collaboration with the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Central Kalimantan. The results show that participants have a better understanding of voter integrity and the negative impact of money politics. Furthermore, this initiative is expected to raise awareness of the importance of political participation and encourage young voters to reject money politics in future elections.

Keywords: Political Education, Money Politics, Elections.

Abstrak

Permasalahan *money politics* menjadi ancaman serius terhadap integritas demokrasi baik di tingkat nasional maupun lokal. Hal ini membuka jalan bagi lahirnya figur-figur politik tanpa integritas, sementara preferensi pemilih lebih didorong oleh pragmatisme dibandingkan dengan rasionalitas. Masalah ini menuntut perhatian khusus agar proses demokrasi elektoral tidak dikendalikan oleh kapital. Oleh karena itu diperlukan pendidikan politik bagi pemilih khususnya pemuda Palangka Raya untuk mendorong integritas pilkada 2024 melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini menargetkan pemilih muda di Palangka Raya, khususnya mereka yang terdaftar dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan edukasi terkait nilai-nilai integritas pemilih dan resistensi terhadap *money politics* yang diakhiri dengan evaluasi menggunakan instrument kuesioner melalui *google form* yang terkait pemahaman pemilih muda terhadap materi yang disampaikan. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Tengah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang integritas pemilih dan dampak negatif *money politics*. Selain itu, diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik dan mendorong pemilih muda untuk menolak *money politics* dalam pemilihan mendatang.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Money Politics, Pilkada, Integritas Pemilih.

A. PENDAHULUAN

Indeks demokrasi Indonesia saat ini masih berada pada kategori *impeded democracy*, dengan salah satu problematika mendasar adalah terjadinya disrupsi tatanan politik dalam proses demokrasi elektoral (EIU, 2022). Disrupsi demokrasi ini merujuk pada fenomena merosotnya nilai-nilai

dasar demokrasi yang terjadi akibat distorsi dalam penyelenggaraan pemilu (Sorensen, 2020). Penyebab utama dari kemerosotan ini meliputi biaya politik yang sangat tinggi, kebutuhan logistik dan saksi yang mahal, biaya politik transaksional dalam internal partai, serta lemahnya supremasi hukum (Satriawan & Angela, 2024).

Problem ini selaras dengan hasil penelitian Politics and Government Research Center (PolGov) dan Coral Bell School of Asia Pacific Affairs di Australian National University (ANU), yang menyimpulkan bahwa politik di Indonesia masih didominasi oleh transaksi oligarkis (Aspinall, 2018). Fenomena politik transaksional ini merupakan ancaman laten terhadap integritas sistem demokrasi, baik di tingkat nasional maupun lokal, karena mengutamakan kekuatan finansial tanpa mempertimbangkan kapabilitas atau kompetensi kandidat (Cahyo, 2016; Margiansyah, 2019). Hal ini membuka jalan bagi lahirnya figur-figur politik tanpa integritas, sementara preferensi pemilih lebih didorong oleh pragmatisme dibandingkan dengan rasionalitas.

Demokrasi elektoral saat ini didominasi oleh pengaruh kekuatan modal, menjadikan finansialisasi politik sebagai faktor utama dalam proses demokrasi (Avis et al., 2022). Masalah ini menuntut perhatian khusus agar proses demokrasi elektoral tidak dikendalikan oleh kapital. Maka dari itu, penguatan integritas elektoral serta resistensi terhadap politik patronase atau politik uang menjadi sangat penting, karena demokrasi hanya dapat berhasil jika terjadi kompetisi sehat, kontestasi gagasan politik yang orisinal, serta proses pemilu yang efisien dan efektif (Bettiza & Lewis, 2020).

Praktik *money politics* tidak hanya memperlemah prinsip-prinsip demokrasi, namun juga menghambat terbentuknya pemerintahan yang berintegritas (Ardipandanto, 2020). Pemimpin yang terlahir dari *money politics* adalah sosok pemimpin yang tidak memiliki integritas dan dengan bebas menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan diri atau golongan (Subagyo, 2017; Suhardiman et al., 2023). Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 merupakan momen kritis bagi masyarakat untuk mendorong reformasi demokrasi yang lebih baik. Konsolidasi demokrasi menjadi agenda penting, khususnya di Kota Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi. Secara umum, demokrasi yang terkonsolidasi adalah demokrasi yang mampu bertahan dari berbagai bentuk gangguan (Ramadhan & Masykuri, 2022).

Dilansir dari antaranews.com (2024), Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya menyampaikan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Palangka Raya pada tahun 2024 menyentuh angka 80% dari total 211.423 daftar pemilih tetap (DPT), meningkat 1,7% dari pilkada tahun 2020 yang mencapai 78,3% dari total 217.489 daftar pemilih tetap (DPT). Angka ini lebih tinggi dengan rata-rata partisipasi nasional pada Pilkada serentak, yang mencapai 76,09%. Tingginya tingkat partisipasi ini menunjukkan potensi besar untuk mengonsolidasikan demokrasi, khususnya melalui

partisipasi pemilih pemuda dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Wali Kota Palangka Raya tahun 2024.

Data di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 35% pemilih pemuda di Palangka Raya rentan terhadap praktik *money politics*, yang menjadi ancaman terhadap integritas demokrasi (Ramadhan & Masykuri, 2022). Meskipun *money politics* telah terjadi berangsur-angsur dari tahun ke tahun, hal itu masih marak terjadi karena minimnya pemahaman pemilih dan adanya faktor sosial ekonomi dalam suatu kondisi (Ekasari et al., 2024; Zainal et al., 2021). Level pengetahuan masyarakat terkait politik uang menyebabkan pengamalan *money politics* dipandang sebagai alamiah dan terus terjadi (Widjaja et al., 2021). Hal ini memberikan dampak negatif pada kualitas pemahaman suara masyarakat selama proses (Risal et al., 2019). Urgensi dari pendidikan politik akan memberikan pemahaman yang baik bagi pemuda menjelang Pilkada untuk memaksimalkan kualitas demokrasi di masa depan

Pendidikan politik ini diharapkan dapat meminimalisir infiltrasi politik uang, meningkatkan partisipasi politik baik secara kuantitas maupun kualitas, serta membangun kesadaran masyarakat mengenai kewajiban mereka sebagai warga negara dalam sistem demokrasi yang sehat (Suhardiman, dkk., 2023). Oleh karena itu diperlukan pendidikan politik bagi pemuda yang diwujudkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda dan meningkatkan pengetahuan pemilih muda terkait *money politics* untuk mendorong integritas dalam pilkada 2024, terutama dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah.

Manfaat dari kegiatan pemberdayaan ini diharapkan dapat menghasilkan pemilih pemuda yang berintegritas dan kritis, mampu menilai secara objektif setiap calon pemimpin tanpa terpengaruh oleh iming-iming politik uang sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Palangka Raya, serta menciptakan ruang bagi munculnya pemimpin yang berintegritas dan berkualitas.

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di wilayah tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli 2024, dengan melibatkan 22 pemilih pemula yang berusia 20-24 tahun sebagai target utama.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah edukasi dan diskusi interaktif, dimana peserta diberikan materi tentang nilai-nilai integritas dalam pemilu dan resistensi terhadap *money politics*.

Pemateri terdiri dari akademisi yang berkompeten dalam bidang ilmu politik dan perwakilan dari Bawaslu yang memiliki pengalaman langsung dalam mengawasi jalannya pemilu. Diskusi interaktif juga dilakukan untuk menggali lebih dalam pemahaman peserta mengenai *money politics*.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam tiga tahapan, yakni: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun rincian kegiatan dari masing-masing tahapan tersebut, antara lain:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim pengabdian memulai dengan melakukan identifikasi sasaran, yaitu pemilih muda berusia 20-24 tahun di Kecamatan Jekan Raya. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan mitra dari Bawaslu untuk menentukan dan merancang materi yang relevan. Materi yang disiapkan mencakup: a.) Nilai-nilai integritas pemilih; b.) Bahaya *money politics* c.) Peran aktif pemilih dalam menjaga kualitas demokrasi

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dibagi menjadi dua sesi kegiatan, antara lain:

a. Sesi Penyampaian Materi

Peserta diberikan paparan edukasi melalui presentasi yang interaktif, menggunakan alat bantu visual seperti slide presentasi. Materi meliputi pentingnya integritas pemilih, dampak negatif politik uang, serta studi kasus yang menggambarkan konsekuensi nyata dari *money politics*.

b. Sesi Diskusi Interaktif

Diskusi diadakan dengan format tanya jawab dan brainstorming dengan memberikan contoh kasus, di mana peserta diajak untuk menganalisis situasi terkait *money politics* dan memutuskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menolaknya. Peserta juga diminta untuk berbagi pengalaman pribadi terkait partisipasi politik mereka, yang kemudian dijadikan bahan diskusi untuk menggali pemahaman lebih dalam.

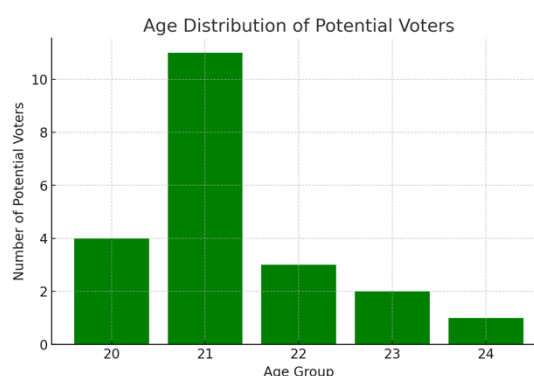
3. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, evaluasi dinilai melalui instrumen yakni kuesioner digital yang disebar menggunakan *Google Forms*. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur dua aspek utama, yaitu: 1.) Tingkat pemahaman peserta mengenai integritas pemilih muda dan pentingnya integritas pemilih muda. Tingkat pemahaman peserta dinilai berdasarkan 3 (tiga) kategori, yaitu: Sangat Paham, Paham, dan

Netral. Target minimal 70% peserta masuk dalam kategori *Sangat Paham* dan *Paham*. 2.) Resistensi terhadap *money politics* dievaluasi melalui pertanyaan yang mengukur sikap peserta terhadap *money politics*, seperti kesediaan untuk menolak uang dari calon dan keinginan untuk melaporkan pelanggaran. Keberhasilan dianggap tercapai jika 75% peserta menyatakan *Setuju* atau *Sangat Setuju* untuk menolak politik uang. Selain itu, partisipasi aktif juga menjadi indikator penting, yang diukur melalui komitmen peserta untuk menjadi agen perubahan, terutama dalam menyebarluaskan nilai-nilai integritas pemilih kepada orang lain. Kesediaan peserta untuk berbagi dan mengedukasi rekan sebaya tentang bahaya politik uang menunjukkan keberhasilan program dalam menciptakan efek domino kesadaran politik. Hasil dari evaluasi ini tidak hanya digunakan untuk mengukur dampak langsung dari kegiatan, tetapi juga menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki dan mengembangkan program serupa di masa depan. Dengan pendekatan evaluasi yang komprehensif ini, program diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas demokrasi yang sehat dan berintegritas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 22 orang peserta dengan rentang usia 20 hingga 24 tahun yang merupakan pemilih pemula di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Berdasarkan distribusi usia, kelompok usia 21 tahun mendominasi dengan jumlah 11 orang, diikuti oleh usia 20 tahun sebanyak 4 orang, usia 22 tahun sebanyak 3 orang, serta usia 23 dan 24 tahun masing-masing sebanyak 2 dan 1 orang. Sebaran usia ini menunjukkan pentingnya menasar pemilih muda, yang masih dalam tahap pembentukan kesadaran politik, sehingga mereka dapat diberdayakan untuk memahami dan menjaga integritas dalam pemilu.



Gambar 1. Distribusi Usia Pemilih Potensial

Grafik di atas menunjukkan distribusi usia dari 22 pemilih potensial yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait edukasi politik di Kalimantan Tengah. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa kelompok usia 21 tahun mendominasi

dengan jumlah terbesar, mencapai 11 orang. Kelompok usia ini diikuti oleh kelompok usia 20 tahun dengan 4 orang, kemudian usia 22 tahun dengan 3 orang, serta kelompok usia 23 dan 24 tahun yang masing-masing diwakili oleh 2 dan 1 orang.

Sebaran usia ini memberikan gambaran penting mengenai keterlibatan pemilih muda dalam proses politik. Kelompok usia 20-24 tahun ini merupakan generasi yang baru memasuki usia dewasa dan berhak memilih, yang seringkali dianggap sebagai segmen pemilih yang masih bisa dibentuk dan diberdayakan dalam hal pemahaman dan sikap politik mereka. Melalui kegiatan ini, mereka diharapkan tidak hanya sekadar berpartisipasi dalam pemilu, tetapi juga mampu memahami betapa pentingnya menjaga integritas dalam memilih, serta menolak godaan politik uang yang sering muncul dalam proses elektoral.

Hasil Edukasi Nilai-nilai Integritas Pemuda Palangka Raya dalam Pilkada 2024

Tim memberikan materi kepada kelompok sasaran mengenai pentingnya menjaga integritas pemilih sebagai landasan utama dalam proses pemilihan umum. Penekanan diberikan pada aspek bagaimana pemilih dapat bersikap rasional dan bebas dari segala bentuk intervensi atau tekanan, baik dari pihak internal maupun eksternal, sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang berintegritas tinggi dan berkualitas. Dengan demikian, diharapkan kualitas demokrasi akan semakin meningkat seiring dengan terpilihnya pemimpin yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

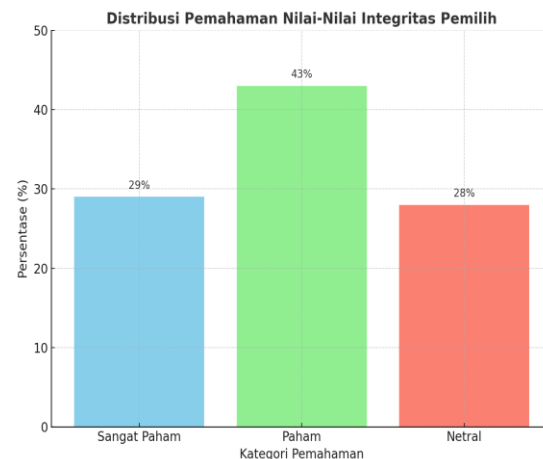
Selain itu, pemilih juga diajak untuk memahami peran aktif mereka dalam memastikan bahwa suara yang mereka berikan adalah cerminan dari nilai-nilai demokrasi yang bersih. Pemahaman ini penting agar pemilu tidak hanya menjadi formalitas, melainkan sebuah proses yang benar-benar mewakili keinginan dan harapan masyarakat luas. Dengan pemahaman hak dan tanggung jawab sebagai pemilih pemuda Palangka Raya diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kualitas pemilu.



Gambar 2. Edukasi Nilai-nilai Integritas Pemilih

Selama sesi edukasi ini, tim juga mengadakan diskusi interaktif untuk lebih memperdalam pemahaman kelompok sasaran. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pandangan, serta memperjelas peran penting pemilih dalam memastikan proses demokrasi yang bersih dan bebas dari *money politics*.

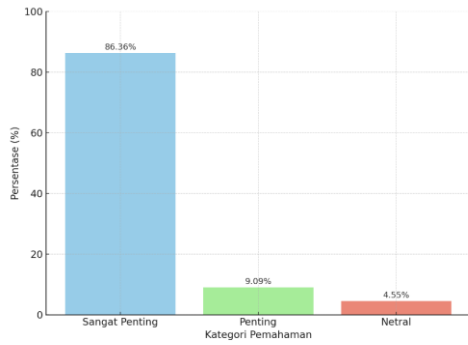
Selanjutnya evaluasi hasil edukasi nilai-nilai Integritas Pemilih muda Palangka Raya melalui Google Forms. Dari evaluasi tersebut, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 72% dari total peserta memiliki pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai integritas pemilih muda.



Gambar 3. Distribusi Pemahaman Nilai-nilai Integritas Pemilih Muda

Diagram batang di atas menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berada pada kategori "Paham" (43%), diikuti oleh kategori "Sangat Paham" (29%), sementara sisanya termasuk kategori "Netral" (28%). Dominasi kategori "Paham" dan "Sangat Paham" menandakan bahwa edukasi yang diberikan berhasil meningkatkan kesadaran peserta akan integritas pemilih. Peserta tidak hanya mampu memahami konsep dasar integritas, tetapi juga mulai menunjukkan sikap yang mencerminkan pemahaman tersebut. Meskipun terdapat peserta dalam kategori "Netral," hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan pendekatan program edukasi agar lebih inklusif dan efektif menjangkau semua peserta. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pemahaman individu, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi penguatan budaya demokrasi yang lebih sehat dan berintegritas.

Tahap evaluasi selanjutnya melalui survei dengan menyoroti pandangan peserta terhadap pentingnya integritas pemilih muda dalam suatu pemilihan kepala daerah. Survei menunjukkan bahwa mayoritas kelompok sasaran menyatakan integritas pemilih sebagai elemen yang sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat.



Gambar 4. Distribusi Pentingnya Integritas Pemilih Muda

Berdasarkan gambar di atas, memperlihatkan bahwa 86,36% peserta menganggap integritas pemilih sebagai sesuatu yang "sangat penting," 9,09% menganggap hal tersebut "penting," dan sisanya 4,55% peserta yang merasa netral terhadap isu ini. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat mengakui bahwa integritas pemilih berperan sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat. Integritas pemilih, yang mencakup kejujuran, transparansi, dan kebebasan dalam memilih, adalah komponen esensial dalam memastikan legitimasi proses demokratis. Ketika elemen-elemen ini terjaga, maka hasil pemilihan akan mencerminkan kehendak rakyat secara akurat, dan proses demokrasi dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, upaya untuk terus meningkatkan dan melindungi integritas pemilih harus menjadi prioritas dalam setiap pemilihan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya upaya terus-menerus dalam mendidik pemilih pemula mengenai peran mereka dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas.

Hasil Edukasi Resistensi Terhadap Money Politics

Pada kegiatan ini, tim memberikan edukasi yang mendalam mengenai praktik *money politics* serta bahayanya bagi proses demokrasi menjelang Pilkada 2024.

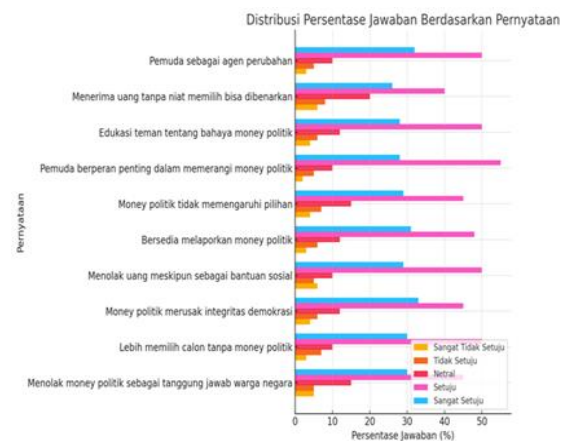


Gambar 3. Penyampaian Materi Mengenai Resistensi terhadap Money Politics.

Dalam sesi ini, tim menjelaskan kepada kelompok sasaran berbagai bentuk *money politics* yang selama ini terjadi yang dapat berbentuk pemberian uang atau barang untuk menarik dukungan suara, janji-janji politik yang tidak realistis, atau bahkan manipulasi informasi untuk memengaruhi preferensi pemilih. Jika praktik ini tidak segera dihentikan, proses demokrasi akan semakin rusak, menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten. Akibat dari hal ini, masyarakat akan mengalami *trust issue* terhadap proses politik dan pemimpin yang dihasilkan.

Sebagai bagian dari kegiatan, tim juga menggunakan metode diskusi untuk mendorong peserta berbagi gagasan tentang cara mempertahankan integritas mereka saat memilih. Peserta menyadari pentingnya peran mereka sebagai agen perubahan dalam meminimalisir praktik *money politics*, serta pentingnya mengawasi dan melaporkan pelanggaran sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga kualitas demokrasi. Dengan langkah ini, peserta diharapkan dapat menjadi pengawas dan pelapor aktif dalam rangka

Setelah pemaparan materi, evaluasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai sejauh mana kelompok sasaran memahami resistensi terhadap *money politics*. Evaluasi ini dilakukan melalui survei melalui google form yang dirancang untuk mengevaluasi tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan.



Gambar 4. Distribusi Persentase Hasil Evaluasi

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa mayoritas pemuda Palangka Raya memiliki kesadaran tinggi terhadap resistensi terhadap *money politics*. Sebanyak 75% peserta menyadari bahwa menolak politik uang adalah tanggung jawab warga negara, sementara 80% lebih memilih kandidat yang berintegritas meskipun kurang populer. Sebanyak 78% setuju bahwa politik uang merusak demokrasi, dan 79% menyatakan akan menolak uang dari calon meskipun diberikan dalam bentuk bantuan sosial. Keinginan melaporkan praktik politik uang juga tinggi, dengan persentase yang sama (79%). Meski

74% menyatakan *money politics* tidak memengaruhi keputusan mereka dalam memilih, sebagian besar peserta (83%) menyadari pentingnya peran mereka sebagai agen perubahan untuk memerangi praktik ini. Selain itu, 78% bersedia mengedukasi rekan-rekan mereka tentang bahaya politik uang, mencerminkan semangat kolaborasi dan komitmen pemuda dalam menjaga integritas demokrasi. Hal ini menegaskan bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk mendorong pemilu yang bersih dan berintegritas.

Hasil dari kegiatan edukasi yang didukung dengan evaluasi tingkat pemahaman peserta terkait materi nilai-nilai integritas pemilih muda dan resistensi terhadap *money politics* menunjukkan tingkat pemahaman yang baik dibuktikan dengan mayoritas peserta memiliki tingkat persentasi pemahaman yang tinggi dan sikap yang tegas untuk menolak praktik *money politic*. Hasil ini mendukung pandangan Bettiza dan Lewis (2020), bahwa kompetisi politik yang sehat memerlukan keterlibatan pemilih khususnya pemilih muda yang sadar akan nilai-nilai integritas demokrasi. Selain itu, studi Aspinall dan Sukmajati (2018) juga mendukung pentingnya pendidikan politik dalam mendorong resistensi terhadap *money politics*. Faktor-faktor seperti kondisi sosial-ekonomi (Risal et al., 2019), literasi politik yang masih rendah (Siradja et al., 2012), serta akses terhadap informasi politik, turut memengaruhi pemahaman pemilih muda tentang pentingnya integritas.

Kegiatan pengabdian ini memberikan dampak nyata, terlihat dari 78% peserta yang mengakui bahwa *money politics* merusak demokrasi dan 83% memahami peran penting mereka sebagai agen perubahan. Peserta juga memberikan tanggapan yang positif terhadap program ini, terutama pada sesi diskusi interaktif yang membantu mereka memahami isu politik uang secara lebih mendalam. Meskipun demikian, kendala seperti keterbatasan waktu dan kesenjangan akses terhadap teknologi menjadi tantangan yang perlu diperbaiki.

Secara keseluruhan, program ini diharapkan mampu membawa dampak jangka panjang dengan mendorong generasi muda untuk lebih kritis dan sadar terhadap integritas pemilu. Dengan adanya kesadaran ini, diharapkan kualitas demokrasi pada Pilkada 2024 dapat meningkat, dan praktik politik uang semakin diminimalkan.

D. PENUTUP

Simpulan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan tema Pendidikan Politik Bagi Pemuda Palangka Raya Untuk Mendorong Integritas dalam Pilkada 2024 telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta

mengenai pentingnya menjaga integritas dalam pemilihan. Sebagian besar peserta, sekitar 75%, memahami bahwa menolak *money politics* adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu, peserta juga menunjukkan resistensi yang kuat terhadap praktik *money politics*, dengan mayoritas menyatakan akan menolak pemberian uang dari calon, bahkan jika diberi dalam bentuk bantuan sosial. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya integritas dalam demokrasi dan keberlangsungan pemilu yang sehat.

Di samping itu, mayoritas peserta menyadari pentingnya peran mereka sebagai agen perubahan dalam menjaga integritas pemilu. Sekitar 83% peserta menganggap pemuda berperan penting dalam memerangi praktik *money politics*, dan mereka menunjukkan kesediaan untuk menyebarkan nilai-nilai anti-*money politics* kepada teman-teman dan lingkungannya. Ini berarti kegiatan pendidikan politik ini tidak hanya berdampak pada pemahaman peserta langsung, tetapi juga dapat menciptakan efek domino dalam meningkatkan kesadaran di kalangan pemilih muda lainnya.

Saran

Untuk memperluas dampak positif yang telah dicapai, disarankan agar program pendidikan politik ini diperluas ke wilayah-wilayah lain di Kalimantan Tengah dan diterapkan secara berkelanjutan. Edukasi politik bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial dan platform digital yang menarik bagi pemilih muda, sehingga lebih banyak generasi muda dapat terjangkau. Selain itu, kolaborasi dengan pihak berwenang seperti Bawaslu perlu diperkuat, agar pengawasan terhadap praktik *money politics* dapat dilakukan secara lebih efektif selama proses pemilu. Dengan langkah ini, diharapkan integritas demokrasi semakin kuat, terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami sampaikan kepada LPPM Universitas Palangka Raya atas dukungannya melalui pemberian dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Antara.news.com. (2024). *Partisipasi Masyarakat Palangka Raya Pada Pemilu Lebih 80 Persen*. Diakses 17 November 2022, <https://www.antarane.ws.com/berita/3993192/partisipasi-masyarakat-palangka-raya-pada-pemilu-lebih-80-persen>
- Ardipandanto, A. (2020). *Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020: Evaluasi Pelaksanaan dan Kebijakan*.

- Aspinall, E. , & Sukmajati, M. . (2018). *Electoral Dynamics in Indonesia* (E. Aspinall & M. Sukmajati, Eds.). NUS Press Pte Ltd. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1xxzz2>
- Avis, E., Ferraz, C., Finan, F., & Varjão, C. (2022). Money and Politics: The Effects of Campaign Spending Limits on Political Entry and Competition. *American Economic Journal: Applied Economics*, 14(4), 167–199. <https://doi.org/10.1257/app.20200296>
- Bettiza, G., & Lewis, D. (2020). Authoritarian Powers and Norm Contestation in the Liberal International Order: Theorizing the Power Politics of Ideas and Identity. *Journal of Global Security Studies*, 5(4), 559–577. <https://doi.org/10.1093/jogss/ogz075>
- Cahyo, M. S. S. S. D. (2016). *Ideologi Sosialisme Indonesia Perspektif Partai Rakyat Demokratik (Studi pada Komite Pimpinan Wilayah PRD Lampung Tahun 2010-2015)*.
- Ekasari, F., Sukmana, O., Kristiono, R., & Susilo, D. (2024). Sikap Apatis Generasi Muda Terhadap Money Politic. *JRPP: Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*.
- Margiansyah, D. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 47–68.
- Ramadhan, M. F. S., & Masykuri, R. (2022). Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara: Refleksi dari Enam Negara. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 141–158.
- Risal, S., Malinau, P., Utara, K., & Pratiwi, E. (2019). *Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan Negara Dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Malinau*.
- Satriawan, B. H., & Angela, V. F. (2024). Democracy Disrupted: High Political Costs, Transactional Politic, and Corruption. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 4(1), 59–71. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.4.1.59-71>
- Siradja, N. G., Alam, A. S., & Syamsu, S. (2012). Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 75–84.
- Sorensen, L. (2020). Disrupting democracy: Democratization conflicts as performative struggles. *Media, War & Conflict*, 13(1), 8–26. <https://doi.org/10.1177/1750635219870225>
- Subagyo, A. (2017). *Kepemimpinan Nasional untuk Generasi Milenial di Era Digital*.
- Suhardiman, S., Rachman, M., & Jamiah, J. (2023). *Birokrasi & Public Governance*. Tahta Media.
- The Economist Intelligence Unit (EIU). (2022). *Democracy Index 2022, The Economist Intelligence Unit*. eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022
- Widjaja, P., Wibowo, D. P. A. W., & Geovasky, I. (2021). Identity Politics and Pancasila-Based Religiousity in The Public Sphere. *GemaTeologika*. <https://doi.org/10.21460/gema>
- Zainal, W. Y., Nazar, J., Fitri Z, Y., & Irwan, I. (2021). Efektifitas Masyarakat Sipil di Kenagarian Kab. Lima Puluh Kota dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Demokratis. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 79–100. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.731>